

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah kebijakan perikanan Indonesia, yaitu keputusan Indonesia untuk berbagi data Vessel Monitoring System (VMS) dengan Global Fishing Watch (GFW). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan mengambil pandangan global governance, collective legitimization, dan rationalist approach of international regimes. Argumen yang dihadirkan yaitu kepentingan Indonesia berbagi data VMS dengan GFW adalah untuk meningkatkan legitimasi Indonesia di mata internasional dengan tujuan agar aktivitas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) masuk dalam transnational organized crime (TOC). Penelitian ini dimulai dengan memaparkan masalah IUUF di Indonesia yang mengurai perihal gambaran IUUF di Indonesia, IUUF sebagai ancaman keamanan Indonesia, kontribusi perikanan terhadap ekonomi Indonesia, hingga upaya Indonesia mengatasi IUUF. Penelitian ini berlanjut pada upaya identifikasi aktor-aktor yang terlibat yaitu GFW serta teknologi yang digunakan yaitu Automatic Identification System (AIS) dan VMS. Pada pembahasan selanjutnya, tesis ini menguraikan analisa mengenai kepentingan Indonesia melalui kerja sama antara Indonesia dan GFW, GFW sebagai agen legitimasi serta keinginan membentuk rezim transparansi perikanan oleh Indonesia. Pada akhirnya tesis ini menyajikan konfirmasi argumen bahwa Indonesia menggunakan GFW sebagai agen untuk melegitimasi kebijakan Indonesia yaitu kebijakan untuk berbagi data VMS dengan GFW. Dengan menggunakan GFW, Indonesia berupaya menetapkan standar transparansi perikanan internasional agar aktivitas IUUF masuk dalam kategori TOC.

Kata kunci : vessel monitoring system, global fishing watch, Indonesia, illegal, unreported and unregulated fishing, transnational organized crime.

ABSTRACT

This study examines Indonesia's fishery policy, namely Indonesia's decision to share Vessel Monitoring System (VMS) data with Global Fishing Watch (GFW). This research uses descriptive-analytic method by taking global governance, collective legitimization, and rationalist approach of international regimes views. The argument presented is that Indonesia's interest in sharing VMS data with GFW is to increase the legitimacy of Indonesia in the eyes of the international with the aim that Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) activities are included in transnational organized crime (TOC). This research begins by explaining the problem of IUUF in Indonesia that unravels the description of IUUF in Indonesia, IUUF as the threat of Indonesian security, fishery contribution to Indonesian economy, until the effort of Indonesia to overcome IUUF. This research continues to identify the actors involved are GFW and the technology used such as Automatic Identification System (AIS) and VMS. In the following discussion, this thesis describes an analysis of the interests of Indonesia through cooperation between Indonesia and GFW, GFW as a legitimizing agent and the desire to establish a fisheries transparency regime by Indonesia. Ultimately, this thesis presents a confirmation of the argument that Indonesia uses GFW as an agent to legitimize Indonesia's policy of sharing VMS data with GFW. By using GFW, Indonesia seeks to set international fisheries transparency standards for IUUF activities to fall into the TOC category.

Keywords: vessel monitoring system, global fishing watch, Indonesia, illegal, unreported and unregulated fishing, transnational organized crime.